



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Jalan Ahmad Yani Nomor 28, Sorong 98414
Email: pabada@bpkp.go.id, Website: <https://www.bpkp.go.id>

Nomor : PE.09.02/S-635/PW35/2/2026 31 Juli 2026
Lampiran : Satu Surat Tugas
Hal : Evaluasi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Tahun 2026
pada Kabupaten Raja Ampat

Yth. Bupati Raja Ampat
di Waisai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor PE.09.02/S-189/D2/02/2026 tanggal 15 Juli 2026 hal Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Topik Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, kami menugaskan tim untuk melakukan Evaluasi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Tahun 2026 pada Kabupaten Raja Ampat dengan susunan tim sesuai surat tugas terlampir.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam periode tanggal 3 Agustus sampai dengan 4 September 2026.

Seluruh biaya yang berkaitan dengan penugasan ini menjadi beban anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya.

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Disandatangani secara elektronik oleh

Edi Sunardi

Layanan Pengaduan/Hotline:

Apabila pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id. atau menghubungi 085210991239.



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



Tembusan Yth. :

1. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
3. Inspektur Kabupaten Raja Ampat
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Raja Ampat
11. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Raja Ampat
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Raja Ampat
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Raja Ampat
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Raja Ampat
18. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat
19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat
20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Raja Ampat
21. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
23. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Raja Ampat
24. Kepala Dinas Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Kabupaten Raja Ampat
25. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat
26. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat
27. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Kepala Puskesmas di Wilayah Kabupaten Raja Ampat
29. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat

Layanan Pengaduan/Hotline:

Apabila pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id. atau menghubungi 085210991239.





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Jalan Ahmad Yani Nomor 28, Sorong 98414
Email: pabada@bpkp.go.id, Website: <https://www.bpkp.go.id>

SURAT TUGAS

Nomor: PE.09.02/ST-278/PW35/2/2026

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya dengan ini menugasi:

No	Nama	NIP	Jabatan/Peran
1	Nugroho Purbo Pambudi	19831201 200602 1 004	Wakil Penanggung Jawab
2	Rano Kardo E.G. Sinambela	19870310 201012 1 001	Pengendali Teknis
3	Frida Bugis	19940720 201902 2 001	Ketua Tim
4	Musdalifah	20000727 202505 2 001	Anggota Tim
5	Rashi Ilalang Banyu Langit	20020120 202505 1 001	Anggota Tim
6	Achmad Rikza Romdhoni	20021120 202505 1 001	Anggota Tim

untuk melakukan Evaluasi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Tahun 2026 pada Kabupaten Raja Ampat.

Penugasan ini dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam periode tanggal 3 Agustus sampai dengan 4 September 2026.

Biaya kegiatan ini menjadi beban anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya.

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sorong, 31 Juli 2026

Kepala Perwakilan

Ditandatangani secara elektronik oleh

Edi Sunardi

Layanan Pengaduan/Hotline:

Apabila pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id, atau menghubungi 085210991239.

